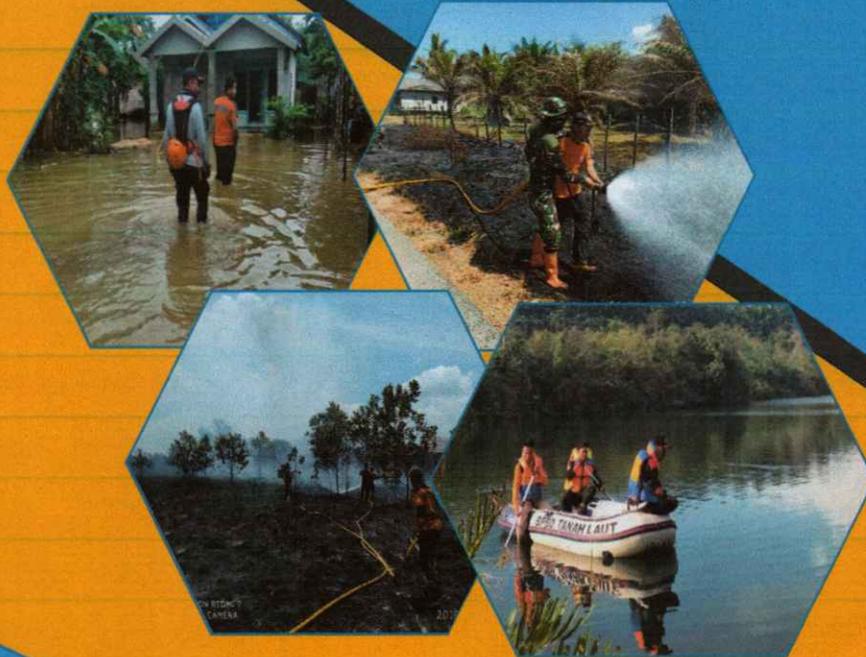




**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, Laporan Kinerja Instansi (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2021.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang..... Aamiin.

Pelaihari, Februari 2022

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Laut**



Ir. SAHRUDIN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19661210 199403 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2018 – 2023.

Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masyarakat yang terdampak bencana yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut.

Pada Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut menargetkan Capaian IKU Badan penanggulangan bencana Daerah sebesar 83,82 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **BAIK**. Keberhasilan tersebut salah satunya didukung adanya bebrbagai faktor di antaranya :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik yaitu Tim reaksi Cepat (TRC) dan Pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebencanaan yang cukup memadai pada Pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut
3. Tersedianya kotak pengaduan pelayanan (kotak saran, saluran telepon dan email)
4. Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat.
5. Inovasi percepatan pelayanan kebencanaan melalui piket harian yang dilakukan di Posko Induk BPBD dan Posko yang ada di Kecamatan Kintap walaupun pelayanan pada hari libur.

Demikian dengan disusunnya LAPKIN ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang.

Pelaihari, Februari 2022

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Laut**



Ir. SAHRUDIN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19661210 199403 1 007

	Hal
KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi.....	2
C. Isu Strategis.....	10
D. Produk dan Layanan.....	10
E. Sistematika Penyajian.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Visi RPJMD.....	15
B. Misi RPJMD.....	15
C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	17
D. Indikator Kinerja Utama.....	23
E. Perjanjian Kinerja.....	23
F. Program dan Kegiatan.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.....	32
1. Sasaran RPJMD.....	33
2. Eselon III (kepala Pelaksana BPBD).....	43
3. Eselon IV (Sekretaris dan Kasi-Kasi).....	56
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	73
1. Anggaran dan Ringkasan realisasi APBD Tahun 2021.....	73
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.....	73
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021.....	74
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	80
LAMPIRAN	
1. IKU	
2. Pernyataan hasil Reviu	
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bertanda tangan	
4. Cascading/Pohon Kinerja	
5. Capaian per triwulan (1-4)	
6. Monev Renstra	
7. Matrik Keselarasan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Atas dasar tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut menyusun Laporan Kinerja (LKj) secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

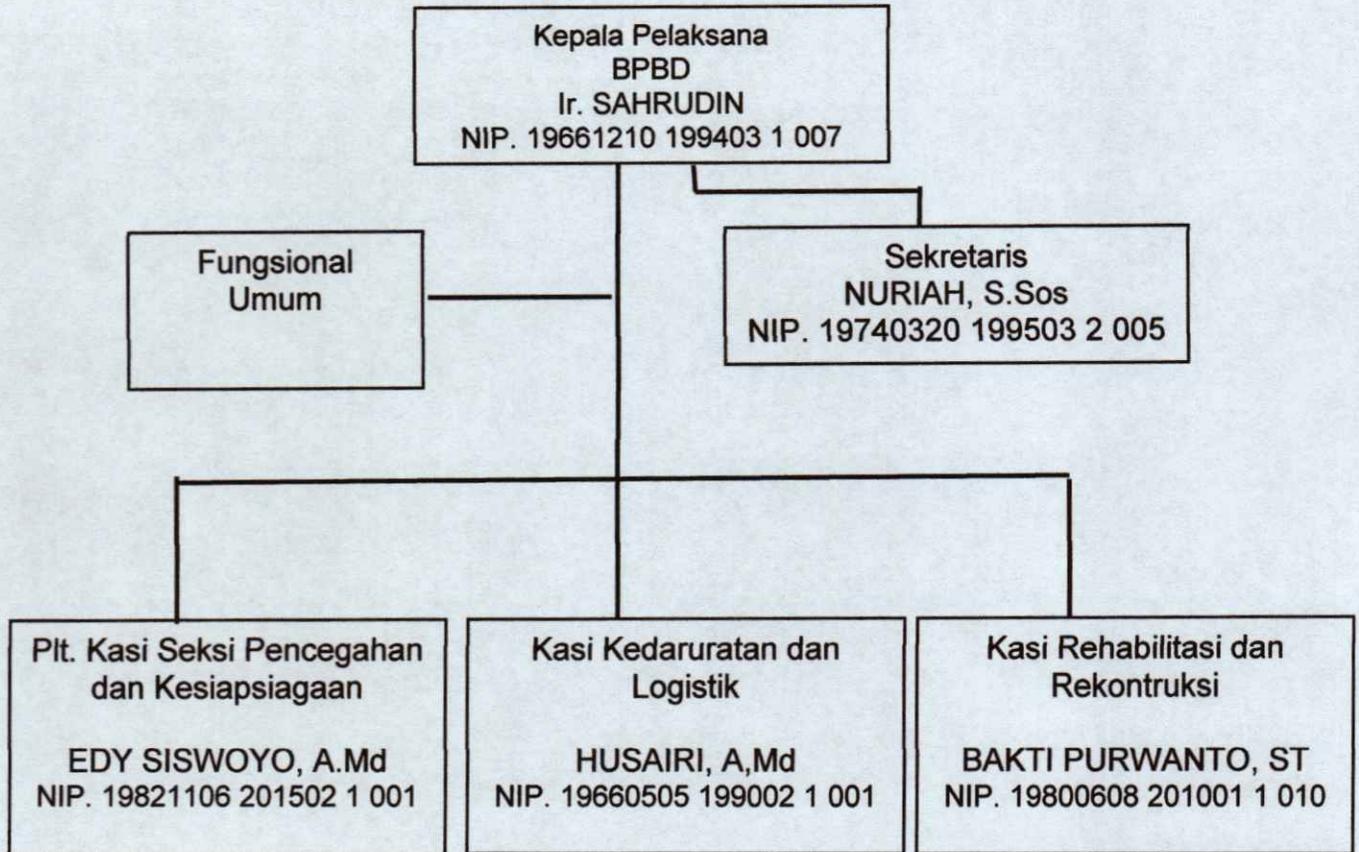
B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut. Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Sekretaris Badan
- c. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Kasi Kedaruratan dan Logistik
- e. Kasi rehabilitasi dan Rekonstruksi

Lampiran IV Peraturan Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 10 Tahun 2013
Tanggal : 20 Agustus 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut BPBD Kabupaten Tanah Laut merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

Tugas Pokok BPBD Kabupaten Tanah Laut yaitu :

URAIAN TUGAS POKOK

a. Kepala Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya;
- b) merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) melaksanakan pembinaan teknis penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- d) melaksanakan kemitraan dalam peningkatan penanganan penanggulangan bencana;
- e) membina, mengawasi dan mengendalikan program penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan prundang-undangan;
- f) membuat laporan kinerja bidang penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya kepada Bupati; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat, terdiri dari :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan urusan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Penyelenggaraan urusan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
7. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu :

Seksi Mitigasi Bencana dalam menjalankan tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan mitigasi bencana;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
- d. Pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;

- e. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
- f. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
- g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian upaya pengurangan resiko bencana; dan
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana.

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasikan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam menjalankan tugas Seksi Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengkoordinasian kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- d. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
- e. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, wajib lati dan sosialisasi penanggulangan bencana;
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsigaan.

d. Seksi Kedaruratan dan logistik

Kedaruratan dan Opsional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kedaruratan dan opsional penanggulangan bencana. Seksi kedaruratan bencana dan Opsional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Opsional Penanggulangan Bencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan opsional penanggulangan bencana;
- c. Penyelenggaraan kedaruratan dan opsional penanggulangan bencana;
- d. Pengkoordinasian opsional penanggulangan bencana;
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengkoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
- f. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
- g. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat; dan
- h. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian sistem komunikasi kebencanaan; dan
- i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Opsional Penanggulangan Bencana.

Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana mempunyai tugas menyelenggaraan dan mengkoordinasikan penanganan pengungsi dan penyediaan logistik penanggulangan bencana. Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan pengungsi dan penyediaan logistik Penanggulangan Bencana;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penanganan pengungsi;
- d. Penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan pengungsi;
- e. Penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- f. Penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyediaan dan penyaluran logistik penanggulangan bencana;
- h. Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengkoordinasian bantuan penanggulangan bencana; dan
- i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana.

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi yaitu :

Rehabilitasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan rehabilitasi. Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja rehabilitasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian analisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rehabilitasi;
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ketingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja rehabilitasi.

Rekontruksi mempunyai tugas menyelenggaraan dan mengkoordinasikan rekontruksi. Rekontruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja rekontruksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rekontruksi;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rekontruksi;
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Rekontruksi.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki pegawai sebanyak 15 (Lima Belas) orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 15 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Pelaksana BPBD sebanyak 1 orang, Sekretaris sebanyak 1 orang, Kepala Seksi sebanyak 2 orang dan staf pelaksana sebanyak 10 orang serta PTT Administrasi sebanyak 8 orang, PTT Pusdalops sebanyak 6 orang dan PTT TRC sebanyak 25. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1 Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	PTT	Jumlah
1	Kepala Pelaksana	0	1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik			1			1
4	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan			0			0
5	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi			1			1
6	Staf PNS				10		10
7	PTT					39	39
	JUMLAH	0	1	3	10	39	54

C. ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPBD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
3. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
5. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
6. Penyediaan dana rencana kontigensi dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

D. PRODUK DAN LAYANAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 66 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

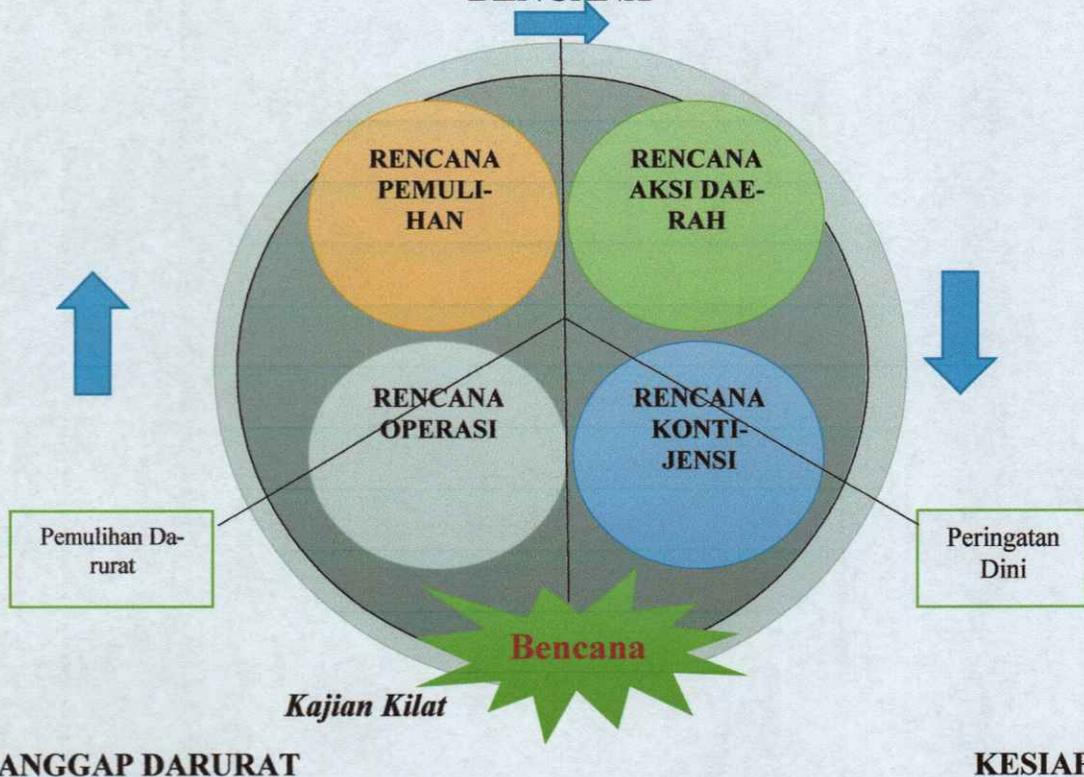
1. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan memberikan pelayanan menyelenggarakan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yaitu dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan dalam menanggulangi bencana.
2. Bidang Kedaruratan Dan Logistik memberikan pelayanan menyelenggarakan Kedaruratan dan Logistik meliputi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana melalui penyaluran logistik, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan pemasangan tenda untuk pengungsian.
3. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi memberikan pelayanan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ketinggian yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut dimulai dari kegiatan perencanaan sampai kepada tahap implementasi. Kegiatan ini tidak pernah berhenti karena kegiatan penanggulangan bencana merupakan sebuah siklus yang terus menyesuaikan dengan keadaan. Siklus penanggulangan bencana dapat terlihat pada gambar di bawah ini:

PEMULIHAN

SIKLUS MANAJEMEN BENCANA

PENCEGAHAN &
MITIGASI



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
 - C. Isu Strategis
 - D. Produk dan Layanan
 - E. Sistematika Penyajian
- BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
- A. Visi RPJMD
 - B. Misi RPJMD

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

D. Indikator Kinerja Utama

E. Perjanjian Kinerja

F. Program dan Kegiatan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

2. Eselon III (Kepala BPBD)

1) Eselon IV Sekretaris

2) Eselon IV Kasi Kedaruratan dan Logistik

3) Eselon IV Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

4) Eselon IV Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

BAB IV : PENUTUP

A. Simpulan

B. Stategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU

2. Pernyataan Hasil Reviu

3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

4. Cascading / Pohon Kinerja

5. Capaian Per Triwulan Tahun 2021

6. Monev Renstra

7. Matrik Keselarasan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan. Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan arah langkah kedepan dengan penuh kepastian. Visi mampu merupakan gambaran konseptual tentang hari depan yang ingin diwujudkan dan mampu menyemangati.

Bertumpu pada konsep visi tersebut, Kabupaten Tanah Laut menetapkan visi "***Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi,*** ".

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan dan daya saing yang tinggi menuju "**Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)**

Keunggulan ini dapat diwujudkan mempersyaratkan adanya potensi dan kompetensi untuk bisa lebih produktif, memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi sesuai tuntutan lingkungan strategi yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh kembang yang semakin dinamis dan kompleks. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan memiliki daya kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya saing komparatif maupun daya saing manfaat (*comparative and advantage competitive*) untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanah Laut menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya *“Sense of responsibility and professionally”* dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing. *Sense of responsibility*, menghendaki setiap pelaku kepentingan memiliki rasa bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Sementara *professionally* lebih mengarah pada kompetensi bagi setiap pelaku kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.

B. MISI RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **“Tanah Laut yang BERINTERAKSI”**, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi BPBD dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Tanah Laut 2018 - 2023 selaras dengan misi ke-2, Ke 3 dan Ke 5 Yaitu :

Misi 2. "Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif "

Penjabaran Misi 2 :

- Menciptakan inovasi dalam pelayanan Kebencanaan melalui penggunaan peralatan yang berstandar untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kebencanaan.

Misi 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Penjabaran Misi 3 :

- Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan Kebencanaan di Kabupaten Tanah laut

Misi 5 " Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat"

Penjabaran Misi 5 :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana bahwa penanganan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi nonpemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, sehingga BPBD Kabupaten Tanah Laut harus Membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten / kota di Propinsi Kalimantan Selatan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a. Tercapainya kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
- b. Tercapainya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.
- c. Tercapainya kualitas pemenuhan dukungan operasional organisasi

Untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, setidaknya diperlukan 3 (tiga) strategi yang didukung formalisasi kebijakan yang membuat masyarakat tangguh dan mampu menghadapi bencana. Strategi tersebut adalah:

1. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat
2. Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi

Tabel 3

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2019 – 2023**

Visi : Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI” (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-									
							2019	2020	2021	2022	2023					
1	Misi ke 5 yaitu: Mem- bangun sinergitas yang baik antartingkat pemerinta- han dalam rangka meningkat- kan kese- jahteraan masyarakat	3 Tercapainya dan kepedulian dan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana	4 Persentase Penanggulangan bencana	5 100%	6 Meningkatnya pelan- yangan penangu- langan bencana terhadap masyara- kat	7 Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	8 8	9 9	10 10	11 11	11 11	82,15 (BAIK)	85,25 (BAIK)	86,50 (BAIK)	87,55 (BAIK)	88,30 (BAIK)

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikaor Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber data
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Hasil Survei	- Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan - Seksi Kedaruratan dan Logistik
		Indeks Risiko Bencana	(Skor)	- Seksi rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah laut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Tanah Laut 2018 - 2023 sesuai dengan Sasaran Renstra BPBD adalah Menciptakan inovasi dalam pelayanan Kebencanaan melalui penggunaan peralatan yang telah terbukti untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat dan Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan Kebencanaan di Kabupaten Tanah laut sehingga bisa meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat bagi masyarakat yang terdampak bencana.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2021 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Bupati Tanah Laut, sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	86,50 (BAIK)	Kepala Pelaksana BPBD
		- Indeks Resiko Bencana (Skor)	130 (Sedang)	
2.	Meningkatkannya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	- Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi.	150 orang	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		- Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	25 Orang	
		- Jumlah Daerah Rawan Bencana	11 Kecamatan	
		- Jumlah Laporan kegiatan Forum PRB	1 Laporan	
		- Jumlah Dokumen bencana yang tersedia	1 Dokumen	
		- Jumlah Desa Tangguh Bencana	2 Desa	Kasi Kedaruratan dan Logistik
		- Jumlah jenis Bencana yang di layani	7 Jenis	
		- Jumlah Logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana.	300 Paket	
		- Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi	25 Buah	
		- Jumlah laporan kejadian	12 laporan	

			bencana		
		-	Jumlah Koordinasi pasca bencana	3 Kali	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		-	Jumlah Lokasi yang terkena dampak pasca bencana	11 Kec	
		-	Jumlah Desa/Kec yang di Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa/Kec	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi organisasi	-	Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	Sekretariat
		-	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dapat terpenuhi sesuai aturan	16 Buah	
		-	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	23 Buah	
		-	Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	
		-	Jumlah event yang di ikuti	2 Pameran	
		-	Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	
		-	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	
		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Baik	

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mendukung visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam sasaran strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 792.000,-	
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 509.200,-	
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 435.200,-	
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 887.200,-	
			5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 900.100,-	
			6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 20.003.980,-	
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.327.832.388,-
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 49.966.000,-
		4	Administrasi umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.346.310,-
				2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 21.910.240,-
				3 Penyediaan Barang Cetak dan Penganggandaan	Rp. 10.845.120,-
				4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Rp. 240.990.000,-

				Konsultasi SKPD	
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 65.387.920,- Rp. 20.705.740,- Rp. 144.866.056,-
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 292.797.160,- Rp. 21.295.000,-
2	Program Penanggulangan Bencana	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 33.228.400,-
		2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota 2 Penanganan Pas-cabencana Kabupaten / Kota	Rp. 918.820.036,- Rp. 82.525.086,-
		3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	1 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota 2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 824.913.706,- Rp. 95.350.900,-
			J U M L A H		Rp. 5.178.307.742,-

Tabel 4
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penganggotaan	Rp. 21.910.240,- Rp. 10.845.120,-
2	Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Program penanggulangan bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 33.228.400,-
			2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota 2. Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Rp. 918.820.036,- Rp. 82.525.086,-
			3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota 2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 824.913.706,- Rp. 95.350.900,-
3	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 792.000,- Rp. 509.200,- Rp. 435.200,-

				3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 887.200,-
				4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 900.100,-
				5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 20.003.980,-
				6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.327.832.388,-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 49.966.000,-
			Administrasi umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.346.310,-
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 21.910.240,-
				3. Penyediaan Barang Cetak dan Penganggotaan	Rp. 10.845.120,-
				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 240.990.000,-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Rp. 65.387.920,-
				2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Rp. 20.705.740,-
					Rp.

				Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.866.056,-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeli- haraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 292.797.160,- Rp. 21.295.000.-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan laporan tahun ke ketiga Renstra 2018-2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara membandingkan antara nilai target terhadap realisasi, apabila target terpenuhi maka dikategorikan tercapai, dan begitu juga sebaliknya apabila nilai target tidak tercapai maka dikategorikan tidak terpenuhi.

Tabel 5
Realisasi Capaian Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	86,50 (Baik)	83,82 (Baik)	97 %
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	130 (Sedang)	74,17 (sedang)	570 %
2	Meningkatkannya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi.	150 orang	75 orang	50%
		Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	25 orang	10 orang	40%
		Jumlah Daerah Rawan Bencana	11 kec	11 Kec	100%
		Jumlah Laporan Kegiatan Forum PRB	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah Dokumen bencana yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Desa Tangguh Bencana	2 Desa	0	0
		Jumlah jenis Bencana yang di layani	7 Jenis	7 Jenis	100%
		Jumlah logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana.	300 paket	140 Paket	46%
		Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi	19 buah	52 buah	273%

		Jumlah laporan kejadian bencana	12 laporan	12 laporan	100%
		Jumlah koordinasi pasca bencana	3 kali	0	0
		Jumlah Lokasi yang terkena dampak pasca bencana	11 Kec	11 Kec	100%
		Jumlah Desa/Kec yang di Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa / Kec	0	0
3	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi organisasi	Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	100%	100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	22 buah	20 buah	90%
		Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Jumlah event yang di ikuti	2 Pameran	1 Pameran	50%
		Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Baik	71,93 BB	100%

1. Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD adalah merupakan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang menjadi Indikator kinerja Utama SKPD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkannya partisipasi aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Indeks Resiko bencana	130 (Sedang)	74,17 (sedang)	570 %

Pengkajian indeks risiko bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu wilayah (komunitas, daerah) dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan kapasitas. Secara konseptual, pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan pendekatan hubungan antara risiko bencana, bahaya, kapasitas dan kerentanan. Risiko bencana berhubungan positif/selaras dengan kehadiran bahaya dan kerentanan, serta berhubungan terbalik dengan kehadiran kapasitas.

Rencana BNPB tahun 2015 – 2019 Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020 Dari 514 Kabupaten kabupaten/ kota di Indonesia terdapat 237 kabupaten kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 277 yang berada pada kelas indeks risiko sedang, Salah satunya adalah Kabupaten Tanah Laut dengan Skor 178 kelas resiko Tinggi.

Skor Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

NO.	KABUPATEN	SKOR	KELAS RISIKO
1	TANAH LAUT	178.0	TINGGI
2	BANJAR	176.4	TINGGI
3	KOTA BARU	158.8	TINGGI
4	TANAH BUMBU	155.6	TINGGI
5	BARITO KUALA	155.5	TINGGI
6	HULU SUNGAI SELATAN	152.4	TINGGI
7	TABALONG	152.4	TINGGI
8	TAPIN	140.4	SEDANG
9	HULU SUNGAI TENGAH	140.4	SEDANG
10	BALANGAN	139.9	SEDANG
11	HULU SUNGAI UTARA	128.4	SEDANG
12	BANJAR BARU	108.0	SEDANG
13	BANJARMASIN	96.4	SEDANG

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
<13	1	RENDAH
13 - 144	2	SEDANG
> 144	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Tahun 2020

1. Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB :
 - a. Indeks Bahaya, 2012
 - b. Indeks Jiwa Terpapar, 2012
 - c. Indeks Kerugian (Rupiah), 2012
 - d. Indeks Kerusakan Lingkungan (Ha), 2012
 - e. Indeks Kapasitas Daerah, 2020
2. Peta Dasar, BIG
3. Batas Administrasi BIG Tahun 2016

Dengan Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

Skor Total	Kelas	Kategori Risiko Bencana
<13	1	Rendah
13 – 144	2	Sedang
>144	3	Tinggi

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 6. Tingkat Risiko Di Kabupaten Tanah Laut

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1	Banjir	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
2	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
3	Cuaca Ekstrims	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
7	Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kabupaten Tanah Laut. Tingkat risiko untuk 7 jenis bencana di Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi dengan tingkat risiko **tinggi**. Hal ini gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan sasaran beserta indikator sasaran sesuai tabel sebagaimana di atas, maka dalam rangka membandingkan capaian sasaran antara tahun 2020 dengan 2021, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2021		
			2020	2021	Target	Realisasi*	% Capaian
1	Indeks Resiko bencana	Skor	178 (Tinggi)	74,17 (sedang)	130 (sedang)	74,17 (sedang)	570 %
Rata-rata capaian kinerja							570 %

Perbandingan kinerja yang dicapai Kabupaten Tanah Laut dalam menurunkan Indeks risiko bencana tersebut melalui 7 Prioritas yaitu :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan rawan bencana
5. Peningkatan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan Sistem pemulihan bencana

Dari 7 Prioritas tersebut terdapat 71 indikator yang harus dilengkapi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan melibatkan beberapa SKPD terkait dalam penanganan bencana untuk menurunkan trend Indeks risiko bencana di Kabupaten Tanah Laut. pada tahun 2019 skor IRB 151,36 dengan kelas Tinggi, Tahun 2020 IRB skor 105,95 dengan kelas Sedang dan Tahun 2021 IRB skor 74,17 dengan kelas Sedang, ada beberapa Indikator yang sudah dilaksanakan atau dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021 sehingga bisa menurunkan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Laut dengan **skor 74,17 dengan kelas Sedang**.

Data hasil peng Entry an di aplikasi <http://admin.inarisk.bnpb.go.id/login>



Perhitungan ini dilaksanakan secara manual melalui aplikasi <http://admin.inarisk.bnpb.go.id/login> dan kenapa terdapat perbedaan dengan hasil IRB tahun 2020 dengan BNPB disebabkan belum ada verifikasi oleh BNPB sehingga nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan atau sama dengan tahun sebelumnya.

Data Perbandingan dari Tahun 2021

No	Indikator	Perbandingan						
		Banjar masin	Banjar	Tanah Bumbu	Tanah Laut	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDGs
1	Indeks Resiko bencana	96,40	165,12	143.94	178		118.6	

Data Dari IRB Tahun 2018-2020

Perbandingan Realisasi dengan Target

Indeks yang dikaji adalah risiko bencana. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dengan demikian perhitungan kali ini ditekankan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (exposure) dari setiap bahaya (hazard) dan gabungan dari beberapa hazard yang ada (multi hazard). Jadi apabila kerawanan yang lalu dihitung dari data korban/kerusakan yang tercatat (data yang tersedia) untuk setiap bencana, saat ini indeks risiko ini dihitung dari potensi kemungkinan korban dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu bencana.

Kebijakan penurunan Indeks Risiko Bencana sampai dengan tahun 2021, pemerintah menargetkan untuk menurunkan indeks risiko bencana sebesar 30%. Locus penurunan indeks risiko bencana adalah 136 Kab/Kota melalui strategi menurunkan dengan cara Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana di tingkat Kab/Kota se Indonesia.

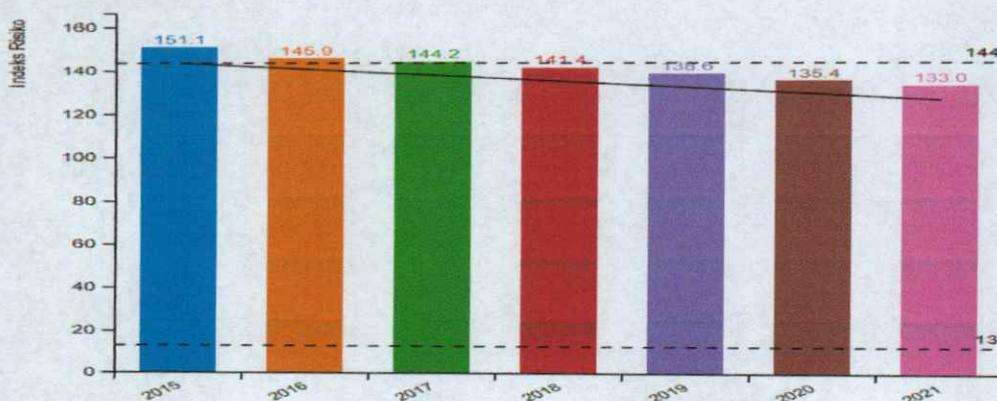
Dalam kurun waktu 2015-2019, BNPB telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional. Berbagai target yang direncanakan telah dicapai melalui pelaksanaan kegiatan. Salah satunya adalah Indeks Risiko Bencana di pusat pertumbuhan ekonomi berisiko bencana (136 kab/kota) telah berhasil diturunkan sebesar 21,74% pada tahun 2019. sedangkan

secara nasional indeks risiko bencana diturunkan sebesar 7,93 % pada tahun 2019. Pada tahun 2015 nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di pusat pertumbuhan ekonomi berisiko bencana (136 kab/kota) adalah sebesar 169,55 dan setiap tahunnya mengalami penurunan hingga menjadi 132,69 pada tahun 2019. Sedangkan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) rata-rata nasional pada tahun 2015 sebesar 156,43 dan tahun 2019 sebesar 144,02. Untuk lebih jelasnya nilai IRBI setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. Gambar 1.13. Indeks Risiko Bencana Indonesia Prioritas Nasional 136.

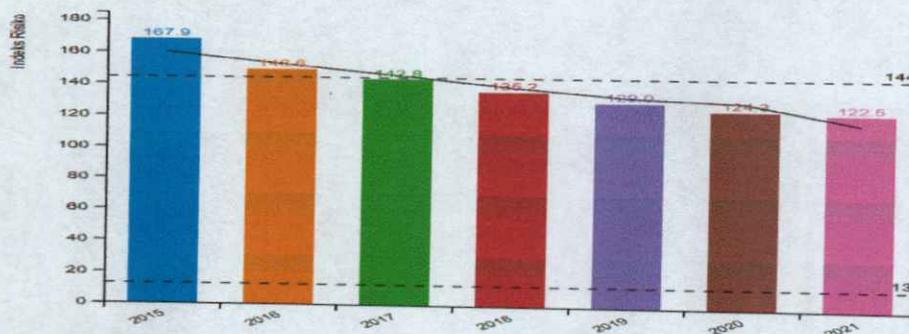
Untuk lebih jelasnya nilai IRBI setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut ini

Indeks Risiko Bencana Indonesia Rata-rata Nasional Periode 2015 – 2021

Indeks Risiko Rata-Rata Nasional



Indeks Risiko Rata-Rata Prioritas Nasional



Terdapat 71 Indikator yang telah disepakati dalam mewujudkan Kab/Kota Tangguh bencana yang korelasi dalam penurunan Indeks Risiko Bencana, beberapa di antaranya adalah upaya penanggulangan bencana yang telah dilakukan BNPB selama periode 2015 – 2019 dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk mencapai sasaran kegiatan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)
- b) Dukungan Pemasangan Peralatan Peringatan Dini
- c) Kajian Risiko Bencana
- d) Dukungan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- e) Dukungan Penyusunan Rencana Kontingensi
- f) Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB)
- g) Relawan Terlatih
- h) Penguatan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)
- i) Produk Hukum dan Kelembagaan BPBD
- j) Dukungan Dalam Penanganan Darurat Bencana

Analisis Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana merupakan kunci untuk menurunkan resiko yang ditimbulkan akibat dampak kejadian bencana. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut menjadikan peningkatan kapasitas sebagai sasaran strategis/utama. Untuk meminimalkan jumlah kerugian yang dapat disebabkan oleh kejadian bencana baik berupa tingkat kerugian, kerusakan maupun jumlah korban jiwa. Upaya peningkatan kapasitas dilakukan mulai dari tahap pra bencana, saat darurat bencana dan pasca bencana yang diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Tahap pra-bencana yaitu melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana memberikan Pelayanan Informasi Rawan Bencana melalui:
 - a) Sosialisasi peringatan dini bencana dalam rangka menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu mengenai peraturan dan sanksi pidana apabila warga membuka lahan atau membakar lahan dengan sengaja.

- b) Memberikan pelatihan kepada tenaga Pusdalops PB (Pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana) untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya anggota pusdalops BPBD Tanah Laut dalam rangka dukungan kesiapsiagaan mengenai informasi dan data kebencanaan dan Pelatihan Vertical Rescue kepada tenaga TRC (tim reaksi cepat) untuk peningkatan sumber daya manusia dalam rangka penanganan lokasi bencana, evakuasi dan penyelamatan korban bencana serta kemampuan teknis lainnya yang ada dilapangan.
 - c) Hari Kesiapsiagaan Bencana yang diperingati setiap tahun tanggal 26 April yaitu untuk memberikan informasi kepada Peserta apel (Polri, TNI, SKPD, Relawan kebencanaan dan masyarakat) untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi musim hujan yang akan terjadi bencana banjir, tanah longsor serta angin puting beliung dan menghadapi musim kemarau yang akan terjadi peningkatan kebakaran pemukiman serta hutan dan lahan.
 - d) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Pemantauan dilakukan dengan melaksanakan posko siaga darurat dalam rangka antisipasi bencana yaitu terbentuknya kelompok/regu piket yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusdalop (Pusat Pengendali dan Operasional) Penanggulangan Bencana, dengan adanya kegiatan rutin piket penjagaan posko selama 24 jam penuh sejak bulan Januari hingga Desember, serta khususnya pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat puncak musim hujan, pada saat libur hari raya, tahun baru, dan even tertentu. Pelaksanaan kegiatan mulai dari piket jaga, menerima laporan kejadian bencana, pelaksanaan penanganan bencana dan pelaporan kejadian bencana
2. Tahap pada saat tanggap darurat yaitu pada saat terjadi bencana melalui Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana melalui :
- a) Menyiapkan Peralatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Peralatan penanggulangan bencana yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya penanganan bencana. Pengadaan peralatan penanggulangan bencana meliputi peralatan untuk penanganan bencana maupun peralatan komunikasi untuk memudahkan koordinasi. Peralatan penanganan bencana terdiri atas perahu apung (perahu karet dan perahu polytheiylen), Mobil tangki air,

mesin apung, jetshooter, mesin potable, pakaian tahan api, selang dan komper serta alat pendukung lainnya seperti tenda pengungsi, tenda keluarga, Velbeit, tandu, tali karmantel dan rompi pelampung serta alat komunikasi untuk mendukung proses koordinasi dalam penanganan bencana meliputi handy talky (HT).

- b) Penanganan Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut berupaya melakukan penanganan kejadian secara cepat dan tepat, bersama relawan yaitu Tim Reaksi Cepat dan Pusdalop PB (Pusat Pengendali Operasil Penanggulangan Bencana). Laporan kejadian yang masuk segera ditindak lanjuti dengan pengecekan lokasi dan melakukan assesment atau kaji cepat kondisi tanggap darurat, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti perangkat setempat, dinas terkait, polsek, TNI, maupun tim relawan untuk bersama-sama menangani bencana. Setiap kejadian bencana wajib dilaporkan kepada kepala daerah yaitu Bupati Tanah Laut dan BPBD Provinsi maupun BNPB, sebagai bentuk tindaklanjut dan dasar untuk pengajuan bantuan bagi korban bencana.

Berikut rincian jumlah kejadian masing – masing jenis bencana pada tahun 2021:

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN
1.	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KEBAKARAN PEMUKIMAN, FASILITAS UMUM DAN LAIN-LAIN	73 Kali
2.	POHON TUMBANG	1 Kali
3.	EVAKUASI KORBAN TELAH MENINGGAL DUNIA, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	7 Kali
4.	ANGIN PUTING BELIUNG	6 Kali
5.	BANJIR	79 Kali
6.	PASANG AIR LAUT	13 Kali
7.	TANAH LONGSOR	2 KALI
TOTAL KEJADIAN		181 Kali

- c) Penanganan Bencana Non Alam yaitu pandemic Covid 19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut berupaya melakukan patroli atau sosialisasi pengendalian mobilitas dan kegiatan masyarakat di Fasilitas Umum (Ruang Terbuka Hijau, tempat wisata dan rumah makan) yang belum tutup sampai jam 22.00 malam, bersama TNI dan Polri, Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, PMI, Orari Tanah Laut, BPBD (TRC dan Pusdalops) dan relawan kebencanaan serta secara langsung melaksanakan swab di tempat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
 - d) Pengadaan Logistik Kebencanaan diperuntukkan bagi korban terdampak bencana maupun pengungsi dalam kondisi darurat bencana. Bantuan logistik dimaksudkan sebagai stimulan untuk membantu memenuhi kebutuhan saat masa darurat bencana, yang meliputi bahan pokok makanan (sembako) dan peralatan kebutuhan lainnya.
3. Tahap pasca bencana yaitu saat setelah terjadi bencana melalui program penanganan Pascabencana melalui :
- a) Pemulihan Kerusakan Dampak Bencana Alam Penanggulangan bencana merupakan suatu kesatuan upaya pengurangan risiko bencana (pencegahan), penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana. Pemulihan kerusakan dampak bencana merupakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dengan melakukan perhitungan kebutuhan dari obyek yang mengalami kerusakan akibat dampak bencana baik berupa fasilitas umum/publik maupun rumah masyarakat pada tahun 2021 BPBD Dana stimulant (DSP) yang berasal dari BNPB diperuntukkan perbaikan rumah rusak bagi korban bencana Banjir dan Tanah Lonsor yang terjadi pada awal tahun 2021 di Kabupaten Tanah Laut.
 - b) Pelatihan dasar dalam kegiatan pasca bencana bagi aparat desa atau relawan untuk mendata kerusakan rumah, infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.

1. Eselon III (Kepala Pelaksana BPBD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut bahwa Badan Pe-

nanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah dan Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab Kepada Kepala Badan yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun Sasaran Strategis Kepala Pelaksana BPBD (Eselon III) adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	86,50 (Baik)	83,82 (Baik)	97%

LAPORAN PERBANDINGAN REALISASI DENGAN KINERJA

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 adalah :

Perbandingan antara Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel : Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2021		
			2019	2020	Target	Realisasi*	% Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Tahun	81, 23 (Baik)	82, 81 (Baik)	86,50 (Baik)	83,82 (Baik)	97 %
Rata-rata capaian kinerja							97%

Capaian Kinerja Tahun 2021 sebesar capaian 97% atau 100%. dengan terealisasi sebesar 83,82 dengan predikat Baik.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan 2021 dijabarkan pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	85,25 (Baik)	82,81 (Baik)	86,50 (Baik)	83,82 (Baik)

Perbandingan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Laut 2020 dan 2021, mengalami peningkatan dibandingkan target dengan masing-masing capaian kinerja 100%. Perbandingan kinerja tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya sangat baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 dengan target jangka menengah Renstra 2019-2023 dijabarkan pada tabel berikut :

NO	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah					Realisasi Kinerja	
		2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap	82,15 (Baik)	85,25 (Baik)	86,50 (Baik)	87,55 (Baik)	88,30 (Baik)	82,81 (Baik)	83,82 (Baik)

masyarakat yang terdampak bencana								
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Eselon III Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 83,82 dengan angka indeks sebesar 83,82 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **BAIK**, karena berada dalam nilai interval konversi 76,61 – 88,30. Dengan unsur penilaian sebagai berikut :

NO	RUANG LINGKUP	RATA-RATA SKOR	KATEGORI	PERINGKAT	Solusi Peningkatan IKM Tahun 2021
1	Persyaratan Pelayanan	3,253	Baik	9	Memberikan Informasi kejadian bencana yang cepat dan akurat ke BPBD Kab. Tanah Laut
2	Prosedur Pelayanan	3,260	Baik	8	Langsung berhubungan dengan petugas yang ada di Kecamatan dan Posko Induk BPBD
3	Kecepatan Pelayanan	3,533	Baik	2	Memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat agar lebih mendahulukan

					unit emergency pada saat terjadi bencana
4	Kewajaran Biaya Pelayanan	4,000	Sangat Baik	1	Selalu memberikan pelayanan yang terbaik
5	Kesesuaian Produk Pelayanan antara yang Tercantum	3,273	Baik	6	Lebih memaksimalkan lagi pelayanan terhadap masyarakat
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,307	Baik	3	Melakukan pembinaan dan pelatihan
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,300	Baik	4	Lebih sopan dan ramah lagi saat menerima panggilan atau menghadapi laporan untuk melakukan aksi penanggulangan bencana
8	Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,287	Baik	5	Lebih memaksimalkan kembali dalam pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana
9	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	3,267	Baik	7	Lebih memaksimalkan semua layanan pengaduan dari masyarakat

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 150. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 83,82 berada pada kategori “**BAIK**” (pada interval 76,61 s/d 88,30)

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut :

Kategori Mutu Pelayanan

NILAI PER-SEPSI	MUTU PELAYANAN	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI INTERVAL
		SKALA 100	SKALA 1-4
1	A (Sangat Baik)	88,31 – 100,00	3,53 – 4,00
2	B (Baik)	76,61 - 88,30	3,06 – 3,54
3	C (Kurang Baik)	65,00 – 76,60	2,60 – 3,05
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 64,99	1,00 – 2,59

Penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat IKM tahun 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil Kesimpulan bahwa nilai paling rendah yaitu pada : **KESESUAIAN PRODUK PELAYANAN ANTARA YANG TERCANTUM**. Faktor Penghambat kenapa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut pada unsur Kesesuaian Produk Pelayanan antara yang tercantum mendapat nilai rendah yaitu dengan nilai 3.267 hal itu dikarenakan pada pelayanan Kesesuaian Produk Pelayanan antara yang tercantum terdapat pelayanan bencana kebakaran yaitu kebakaran Pemukiman dan Kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 untuk urusan kebakaran masuk ke SATPOL PP, sehingga terjadi tidaksesuaian produk pelayanan. Satpol PP menangani kebakaran pemukiman dan BPBD menangani Kebakaran Hutan dan Lahan.

Adapun Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur **KEWAJARAN BIAYA PELAYANAN**, Faktor Pendukung kenapa Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada unsur Biaya pelayanan tinggi yaitu dengan nilai 4,000 hal itu dikarenakan di BPBD dalam berbagai pelayanan sudah tidak dipungut biaya/gratis. Oleh sebab itu, maka unsur Biaya/Tarif mendapat nilai tinggi. Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian tentang

Biaya/Tarif adalah tetap memberikan Suport dan pembinaan kepada karyawan untuk tetap berkomitem memberikan pelayanan yang Prima.

Pada Tahun 2021 BPBD kabupaten Tanah Laut dalam pengukuran Indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan unit pelayanan BPBD mengedarkan 150 (seratus lima puluh) kuesioner kepada masyarakat yang terdampak bencana yang didalamnya terdapat 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor IKM 83,82 dengan kategori BAIK.

Keberhasilan untuk meningkatkan kinerja unit pelayanan pada tahun 2021 yang diperoleh dengan predikat B (Memuaskan) maka untuk tahun 2022 yang akan datang bisa mencapai predikat A (sangat memuaskan) dengan pelayanan yang BPBD berikan yaitu :

- Dengan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terhadap bencana yang datang dan merespon kaji cepat yaitu waktu minimal untuk menanggulangi bencana (1 x 24) jam.
- Mendistribusikan secepat mungkin logistik kepada masyarakat yang terdampak bencana maksimal 1 hari setelah terjadi bencana.

Permasalahan dan solusi dalam menganalisis Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2021, adalah :

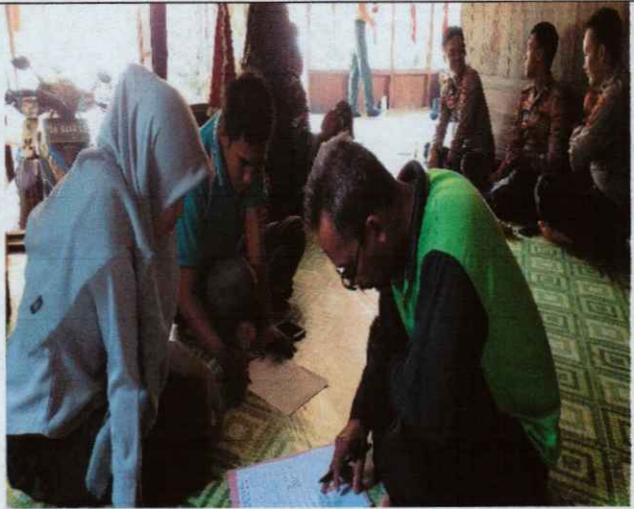
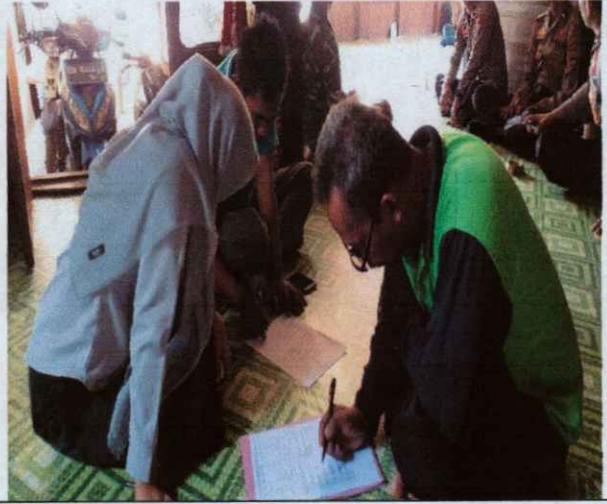
- a) Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum tersedia secara lengkap dan belum sesuai standar nasional karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana tersebut.
- b) Pada saat musim kemarau Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan terjadi daerah yang sulit untuk dijangkau oleh armada BPBD sehingga terjadi kesulitan dalam pemadaman api.

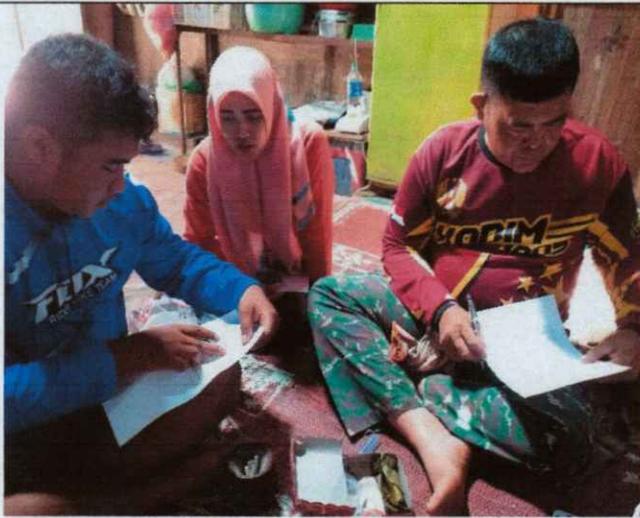
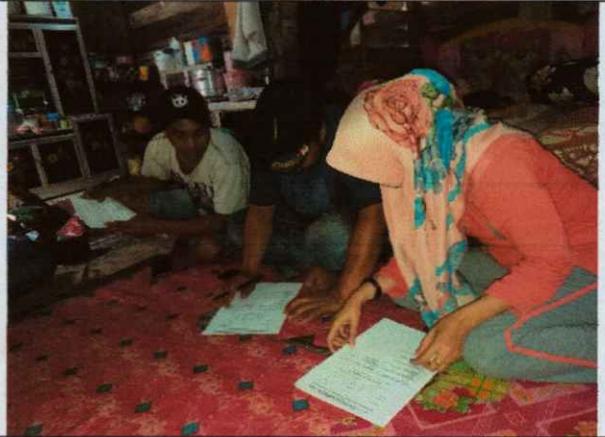
- c) Bencana yang diluar prediksi sehingga Penyaluran logistik untuk kebutuhan dasar bagi korban yang terdampak bencana kadang kadang lebih atau kurang.
- d) Klasifikasi BPBD yang masih Type B mengakibatkan kesulitan untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi BPBD sebagai Komando, Koordinator dan Pelaksana lapangan pada saat tanggap darurat bencana karena stokeholder yang di komando dan di koordinasikan yaitu setingkat Eselon II.

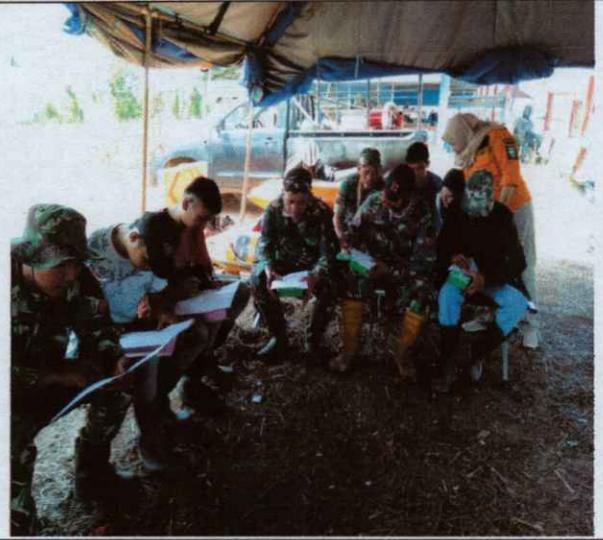
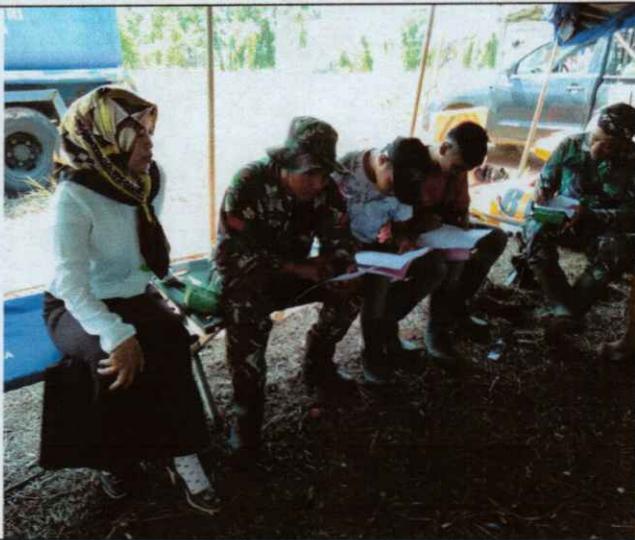
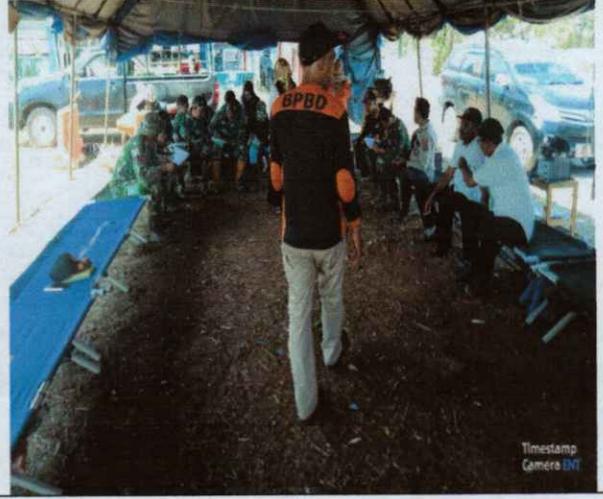
2. Solusi

- a) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas operasional lapangan seperti kendaraan damkar, rescue, dan peralatannya (baik untuk kebutuhan lapangan maupun untuk kelengkapan pengamanan personil).
- b) Untuk hutan dan lahan yang tidak bisa dilalui oleh armada maka dilakukan dengan water bombing itu pun harus menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut selalu berkoordinasi dengan BMKG tentang prakiraan bencana di yang terjadi selama tahun 2021.
- d) Adanya dukungan lintas sektoral untuk kelancaran operasional lapangan

- FOTO MENGISI KUESIONER IKM TAHUN 2021

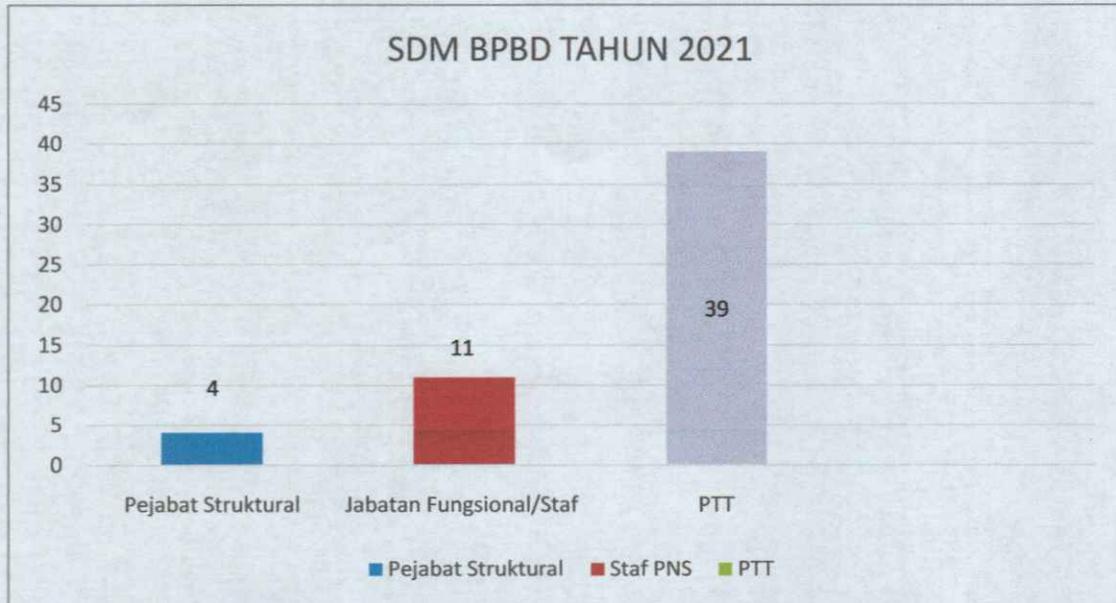






3.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Penunjang Kinerja

Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur yang terlihat pada grafik berikut :



Berdasarkan pada table diatas terlihat bahwa kinerja 54 (limapuluh empat) pegawai sesuai jumlah kebutuhan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa ditangani oleh 15 (lima belas) pegawai ditambah dengan 39 (tiga puluh Sembilan) tenaga PTT dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut dengan sebutan Tenaga Administrasi 8 (delapan) orang, TRC 25 (Dua puluh lima) orang dan Pusdalops PB 6 orang yang ditempatkan di dikantor induk BPBD dan 3 (tiga) orang di Kecamatan Kintap.

3.2 Analisi Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan Sasaran 1

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana terhadap masyarakat capaian sasaran ini telah dilaksanakan melalui program yang berhubungan dengan pelaksanaan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	83,82 (Baik)	32.755.360	27.921.200	85 %



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 32.755.360,00 terealisasi sebesar Rp. 27.921.200,00 atau 85% dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan diantaranya :
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 21.910.240,00 terealisasi sebesar Rp. 19.893.200,00 atau 90.79%.
 - b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 10.845.120,00 terealisasi sebesar Rp. 8.028.000,00 atau 74.02%.

Indikator sasaran telah terealisasi sudah hampir baik yaitu (90%). Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 Indikator sasaran, yaitu: Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat yang terdampak bencana dalam memperoleh pelayanan dari aparatur BPBD sebagai penyelenggaran pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhan serta untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pada awal Tahun 2021 telah terjadi bencana Banjir yang cukup besar di 11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut yang di akibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi sehingga ditetapkan SK tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor atau kejadian luar biasa dengan nomor SK 188.45/97-KUM/2021 selama 14 (empat belas) hari dan 3 kali perpanjangan yaitu 11 s/d 24 Januari 2021, nomor SK 188.45/262-KUM/2021 perpanjangan yang kedua tanggap darurat bencana dari tanggal 25 Januari s/d 7 Februari 2021 dan nomor SK 188.45/315-KUM/2021 perpanjangan yang ketiga tanggap darurat bencana dari 8 s/d 21 Februari 2021 untuk memperbaiki fasilitas yang rusak akibat banjir, serta terdapat di beberapa daerah ketinggian air dari 1 s/d 1,5 meter yang cukup tinggi, sehingga untuk evakuasi masyarakat yang terdampak banjir anggota BPBD di bantu oleh para relawan BPBD Banjarmasin, BPBD Tanah Bumbu dan para perusahaan di Kabupaten Tanah Laut. Dan pada saat tanggap darurat tersebut semua anggota BPBD melakukan evakuasi selama sehari-hari.

2. Eselon IV (Sekretaris BPBD, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kasi Kedaruratan dan Logistik dan Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
		Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan				
2	Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanganan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan reha-	1	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi.	150 orang	75 orang	50%
		2	Jumlah Tenaga TRC /Pusdalops yang	25 orang	10 orang	40%

bilitasi rekonstruksi pasca bencana.			mengikuti pelatihan dan bersertifikat			
	3	Jumlah daerah Rawan Bencana	11 kec	11 Kec	100%	
	4	Jumlah Laporan Kegiatan forum PRB	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	5	Jumlah Dokumen Bencana yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	6	Jumlah Desa Tangguh Bencana	2 Desa	0	0	
	Kasi Kedaruratan dan logistic					
	7	Jumlah jenis Bencana yang di layani	7 Jenis	7 Jenis	100%	
	8	Jumlah logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana	300 paket	140 Paket	46%	
	9	Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi	19 buah	52 buah	273%	
	10	Jumlah laporan kejadian bencana	12 laporan	12 laporan	100%	
	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi					
	11	Jumlah koordinasi pasca bencana	3 kali	0	0	
	12	Jumlah Lokasi yang terdampak pasca bencana	11 Kec	11 Kec	100%	
13	Jumlah Desa/Kec yang Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa / Kec	0	0		
Sekretaris BPBD						
3	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi	14	Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	100%	100%
		15	Jumlah Sarana dan	22 Buah	20 Buah	90%

			Prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan			
		16	Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		17	Jumlah event yang di ikuti	2 Pameran	1 Pameran	50%
		18	Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		19	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%
		20	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Baik	71,93 BB	100%

Perbandingan – Perbandingan Kinerja tersebut diatas dengan capaian dari tahun-tahun sebelumnya dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2020	2021	Target	Realisasi*	Capaian %
1	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	30 orang	75 orang	120 orang	75 orang	62%
2	Jumlah Tenaga TRC / Pusdalops yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	0	10 orang	25 orang	10 orang	40%
3	Jumlah Daerah rawan bencana	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	100%
4	Jumlah laporan kegiatan forum PRB	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
5	Jumlah Dokumen Bencana yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

6	Jumlah Desa Tangguh Bencana	0	0	2 Desa	0	0
7	Jumlah jenis Bencana yang di layani	6 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%
8	Jumlah logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana.	344 Paket	140 Paket	300 paket	140 Paket	46%
9	Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi	52 buah	52 buah	19 buah	52 buah	273%
10	Jumlah laporan kejadian bencana	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%
11	Jumlah Koordinasi Pasca bencana	3 kali	0	3 kali	0	0
12	Jumlah Lokasi yang terkena dampak pasca bencana	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	100%
13	Jumlah Desa/Kec yang di Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	2 Desa / Kec	0 Desa / Kec	4 Desa / Kec	0 Desa / Kec	0
14	Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	20 buah	20 Buah	22 buah	20 Buah	90%
16	Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
17	Jumlah event yang di	0	1 Pameran	2	1 Pameran	50%

	ikuti			Pameran		
18	Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
19	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	5 Laporan	100%	100%	100%	100%
20	Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah SKPD	1 Laporan	71,93 BB	Baik	71,93 BB	100%

Perbandingan Tabel dari Kasi pencegahan dan Kesiapsiagaan Realisasi dan Target dari Tahun lalu:

1. Target yang ditetapkan berdasarkan masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi berjumlah 150 orang sedangkan realisasinya 75 orang yaitu: Sosialisasi Peringatan Dini Bencana di laksanakan pada tahun 2020 di laksanakan hanya 1 Kecamatan yaitu Kintap dengan Pesertanya berjumlah 40 orang dan tahun 2021 di targetkan 120 orang dan realisasinya dilaksanakan di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kintap Desa Kintapura, Kecamatan Kurau Desa Kali Besar dan Kecamatan Pelaihari Desa Penjaratan dengan pesertanya berjumlah 25 orang masing masing kecamatan di kali 3 kecamatan jadi berjumlah 75 orang peserta.
2. Jumlah tenaga TRC / Pusdalops yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat Tahun 2020 tidak ada yang mengikuti pelatihan di karenakan dana anggaran Kontribusi di Refocusing ke Penanggulangan bencana Covid 19 dan Tahun 2021 mengikuti Pelatihan pertolongan di permukaan air atau water rescue di ikuti oleh 1 orang yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di Danau Seran Banjarbaru dan Kolam renang Mulawarman serta 9 orang mengikuti Pelatihan Vertical rescue Indonesia di laksanakan di Tebing Pagat, Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Jumlah daerah rawan bencana yang tertanggulangi pada Tahun 2020 terjadi Kecamatan Pelaihari terjadi 12 Bencana, Kecamatan Takisung terjadi 7

Bencana, Kecamatan Tambang ulang terjadi 9 Bencana, Kecamatan Bajuin terjadi 2 bencana, Kecamatan Bati-Bati terjadi 31 bencana, Kecamatan Batu Ampar terjadi 4 Bencana, Kecamatan Bumi Makmur terjadi 3 bencana, Kecamatan Jorong terjadi 13 bencana, Kecamatan Kintap terjadi 21 bencana, Kecamatan Kurau terjadi 13 bencana dan Kecamatan Panyipatan terjadi 5 Bencana dan Tahun 2021 terdapat bencana di seluruh kecamatan yaitu 11 Kecamatan yaitu : Kecamatan Pelaihari terjadi 29 Bencana, Kecamatan Takisung terjadi 18 Bencana, Kecamatan Tambang ulang terjadi 15 Bencana, Kecamatan Bajuin terjadi 2 bencana, Kecamatan Bati-Bati terjadi 30 bencana, Kecamatan Batu Ampar terjadi 4 Bencana, Kecamatan Bumi Makmur terjadi 15 bencana, Kecamatan Jorong terjadi 14 bencana, Kecamatan Kintap terjadi 20 bencana, Kecamatan Kurau terjadi 21 bencana dan Kecamatan Panyipatan terjadi 13 Bencana sehingga total benjadi terjadi 181 Kali.

4. Jumlah laporan Kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) pada tahun 2021 dilaksanakan pada saat terjadi bencana banjir yang cukup besar terjadi di 11 Kecamatan Kabupaten Tanah Laut bulan Januari s/d Februari 2021 akibat curah hujan yang cukup tinggi sehingga Pa Sekda selaku Ex Officio Kepala BPBD melaksanakan monitoring atau forum pengurangan risiko bencana banjir setiap minggu nya.
5. Jumlah dokumen bencana yang tersedia sampai tahun 2021 sebanyak 3 Dokumen Yaitu Dokumen Rencana Penanggulangan bencana (RPB) Tahun 2019-2023, Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon).
6. Jumlah Desa Tangguh bencana pada tahun 2018 ada 3 desa yaitu di Desa penjaratan kecamatan Pelaihari, Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin dan Desa Kali Besar Kecamatan Kurau dan Tahun 2019 ada 1 Desa yaitu Desa Gunung Raja di Kecamatan Tambang Ulang, Tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada Pembentukan.

Penjelasan Tabel dari Kasi Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut :

7. Jumlah jenis bencana yang di layani tahun 2021 sebanyak 7 jenis yaitu Bencana angin puting beliung, Banjir, Pasang air laut, Kebakaran Pemukiman dan Karhutla, Pencarian orang, Pohon tumbang dan Evakuasi korban yang telah meninggal dunia, pencarian dan pertolongan kepada korban yang hilang.
8. Jumlah logistik yang diterima korban terdampak bencana untuk bantuan korban bencana pada tahun 2021 berjumlah 140 paket yang didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak bencana berupa paket sembako dari pengadaan APBD.
9. Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 tetap sama realisasi 52 buah yang dibeli baik melalui Dana APBD Kabupaten Tanah Laut maupun bantuan dari APBN.
10. Jumlah laporan kejadian bencana pada tahun Tahun 2020 dan 2021 adalah 12 laporan atau setiap bulan data kejadian bencana berjumlah 1 laporan yang langsung dibuat oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan bencana (Pusdalops) PB BPBD Kabupaten Tanah Laut dan di laporkan ke BPBD Provinsi Kalimantan Selatan seterusnya di lanjutkan ke BNPB Republik Indonesia.

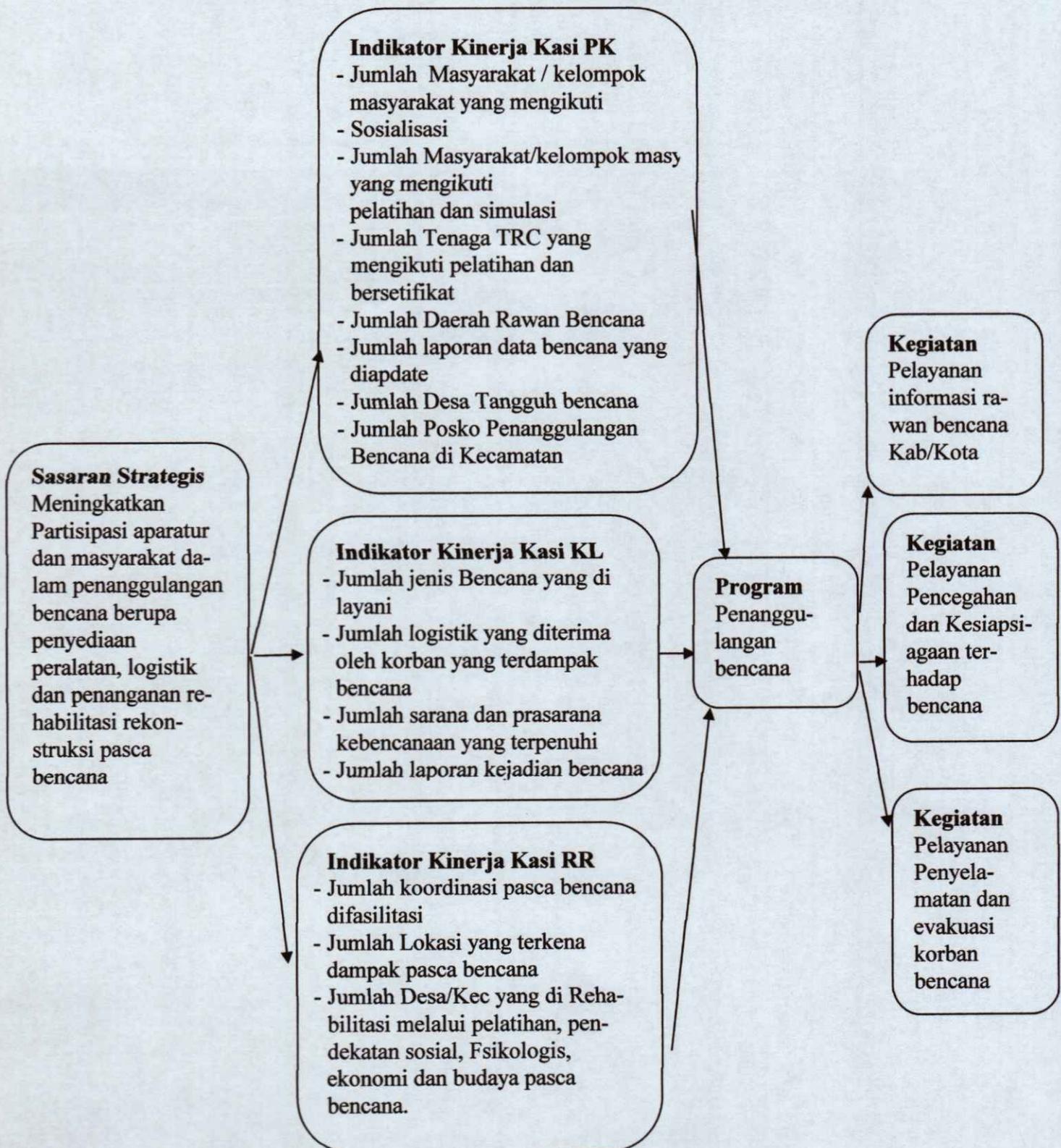
Penjelasan Tabel dari Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi adalah sebagai berikut :

11. Jumlah koordinasi pasca bencana yang di fasilitasi melalui rapat monev kegiatan pelaksanaan bantuan DSP stimulan rumah rusak terdampak banjir dan tanah longsor tidak terlaksana di karenakan kesulitan komunikasi menjadwalkan kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan perbaikan rumah bantuan BNPB dengan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) di Desa dan Kecamatan penerima bantuan. TPM terdiri dari unsur Kepala Desa dan Camat selaku Koordinator masing-masing disibukkan dengan kegiatan di desa dan kecamatan (penyelesaian kegiatan) dan pelaksanaan percepatan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan instruksi dari Presiden RI dan Bupati Tanah Laut.
12. Jumlah lokasi yang terkena dampak pasca bencana dalam Tahun 2020 terjadi Kecamatan Pelaihari terjadi 12 Bencana, Kecamatan Takisung terjadi 7

Bencana, Kecamatan Tambang ulang terjadi 9 Bencana, Kecamatan Bajuin terjadi 2 bencana, Kecamatan Bati-Bati terjadi 31 bencana, Kecamatan Batu Ampar terjadi 4 Bencana, Kecamatan Bumi Makmur terjadi 3 bencana, Kecamatan Jorong terjadi 13 bencana, Kecamatan Kintap terjadi 21 bencana, Kecamatan Kurau terjadi 13 bencana dan Kecamatan Panyipatan terjadi 5 Bencana dan Tahun 2021 terdapat bencana di seluruh kecamatan yaitu 11 Kecamatan yaitu : Kecamatan Pelaihari terjadi 29 Bencana, Kecamatan Takisung terjadi 18 Bencana, Kecamatan Tambang ulang terjadi 15 Bencana, Kecamatan Bajuin terjadi 2 bencana, Kecamatan Bati-Bati terjadi 30 bencana, Kecamatan Batu Ampar terjadi 4 Bencana, Kecamatan Bumi Makmur terjadi 15 bencana, Kecamatan Jorong terjadi 14 bencana, Kecamatan Kintap terjadi 20 bencana, Kecamatan Kurau terjadi 21 bencana dan Kecamatan Panyipatan terjadi 13 Bencana.

13. Jumlah Desa/Kecamatan yang di rehabilitasi melalui rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana pada Tahun 2021 tidak terlaksana karena kegiatan tersebut pada saat perubahan digeser ke kegiatan pelaksanaan bantuan DSP stimulan rumah rusak terdampak banjir dan tanah longsor bantuan dari BNPB.

3.3 Analisa Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan sasaran 2



Analisa Program/Kegiatan Penunjang Kinerja :

Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, Logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana. capaian sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	120 orang	33.228.400,-	30.847.900,	92,84 %
	Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	25 orang			
	Jumlah daerah Rawan Bencana	11 Kec	918.820.036	786.329.452	85,58 %
	Jumlah Laporan kegiatan Forum PRB	1 Laporan			
	Jumlah Dokumen Bencana yang tersedia	1 Dokumen			
	Jumlah Desa Tangguh Bencana	2 Desa			
	Jumlah logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana	300 paket			
	Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang	19 buah			

terpenuhi					
Jumlah jenis Bencana yang di layani	7 Jenis	}	824.913.706	273.425.524	33,15
Jumlah laporan kejadian bencana	12 laporan				
Jumlah koordinasi pasca bencana	3 kali	}	82.525.086	49.904.655	60,47%
Jumlah Lokasi yang terdampak pasca bencana	11 Kec				
Jumlah Desa/Kec yang Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa / Kec				

1. Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 1.954.838.128,00 terealisasi sebesar Rp. 1.227.146.511,00 atau 62,77% dengan Kegiatan dan sub kegiatan:
 - a) Kegiatan Pelayanan Informasi rawan bencana kabupaten/kota, sub kegiatan Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana dengan anggaran sebesar Rp. 33.228.400,00 terealisasi sebesar 30.847.900,00 atau 92,84%.
 - b) Kegiatan Pelayanan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 1.001.345.122,00 terealisasi sebesar Rp. 836.234.107,00 atau 83,51% dengan sub kegiatan:
 - 1) Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi rawan bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 918.820.036,00 terealisasi sebesar Rp. 786.329.452,00 atau 85,58%

- 2) Penanganan Pasca bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 82.525.086,00 terealisasi sebesar Rp. 49.904.655,00 atau 60,47%
- c).Kegiatan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 920.264.606,00 terealisasi sebesar Rp. 360.064.504,00 atau 39,13% dengan sub kegiatan :
- 1) Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 824.913.706,00 terealisasi sebesar Rp. 273.425.524,00 atau 33,15%
 - 2) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban Bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 95.350.000,00 terealisasi sebesar Rp. 86.638,980 atau 90,86%

Analisa Program dan Kegiatan masih belum terealisasi belum maksimal yaitu (60%). Diakibatkan beberapa hal yaitu:

Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/kota tidak tercapai 100% untuk Belanja makanan dan minuman aktifitas lapangan sebesar Rp. 307.800.000. realisasinya 0 % di karenakan tidak diaktifkannya pos lapangan dan posko penanganan bencana kabut asap akibat karhutla di kecamatan – kecamatan yang personilnya terdiri dari instansi lintas sektoral (TNI, Polri, Manggala Agni, Satpol PP dan Damkar BPBD dan Relawan), sehingga belanja makanan dan minuman bagi personil pos lapangan dan posko tidak dapat direalisasikan. Penanganan Karhutlah hanya dilaksanakan melalui pos Induk BPBD Kab. Tanah Laut dan pada saat bersamaan (sekitar Bulan Mei s/d Oktober 2021) terjadi peningkatan kasus Pandemi Covid-19 cukup tinggi yang mana Pemerintah Daerah sangat fokus untuk melaksanakan Patroli dan sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), melibatkan personil yang banyak untuk mendukung kegiatan PPKM dan personil TRC-PB dan Pusdalops PB juga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, serta Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim sebesar Rp. 277.317.000 Realisasi dibawah 50 %, dikarenakan untuk pembayaran tim oprasional penanganan bencana tidak terlalu signifikan, walaupun terjadi bencana banjir dan tanah

longsor pada Bulan Januari 2021 yang terjadi di 9 Kecamatan Kabupaten Tanah Laut, namun untuk pembayaran honorarium atau insentif personil penanganan bencana di bayarkan melalui dana siap pakai (DSP) Bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

- Sub Kegiatan Penanganan Pasca bencana kabupaten/kota tidak tercapai 100% dikarenakan kesulitan komunikasi menjadwalkan kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan perbaikan rumah bantuan BNPB dengan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) di Desa dan Kecamatan penerima bantuan. TPM terdiri dari unsur Kepala Desa dan Camat selaku Koordinator masing-masing disibukkan dengan kegiatan di desa dan kecamatan (penyelesaian kegiatan) dan pelaksanaan percepatan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan instruksi dari Presiden RI dan Bupati Tanah Laut dan belum dilaksanakan pelaporan kegiatan pengelolaan Bantuan Stimulan Rumah Rusak Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor tahun 2021 baru selesai tahap penyaluran dana ke rekening tabungan warga penerima bantuan. Untuk pelaksanaan perbaikan rumah oleh warga penerima bantuan (metode Swakelola/Mandiri) baru sebanyak 8 unit rumah dari 513 rumah yang mendapatkan dana bantuan. Kegiatan belum selesai (dalam proses).

Bidang Sekretariat yaitu dengan Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi organisasi capaian sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%			
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat di	20 buah			

fungsi					
Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen				
Jumlah event yang di ikuti	1 Pameran	RP. 3.223,469.614	Rp. 2.522.081.647	78,24%	
Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen				
Persentase laporan keuangan yang tersusun dengan baik dan benar	100%				
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan SKPD	71,93 BB				

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 3.223.469.614,00 terealisasi sebesar Rp. 2.522.081.647,00 atau 78,24% dengan Kegiatan dan sub kegiatan:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 23.527.680,00 terealisasi sebesar Rp. 8.523.200,00 atau 36,23% dengan Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 792.000,00 terealisasi sebesar Rp. 791.900,00 atau 99,99%
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 509.200,00 terealisasi sebesar Rp. 509.000,00 atau 99,96%

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 435.200,00 terealisasi sebesar Rp. 435.200,00 atau 100%
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 887.200,00 terealisasi sebesar Rp. 887.200,00 atau 100%
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 900.100,00 terealisasi sebesar Rp. 899.900,00 atau 99,98%
 - 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 20.003.980,00 terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,00 atau 25,00%
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.327.832.388,00 terealisasi sebesar Rp. 1.763.624.127.00 atau 75.76% dengan Sub Kegiatan:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.327.832.388,00 terealisasi sebesar Rp. 1.763.624.127.00 atau 75.76%
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 49.966.000,00 terealisasi sebesar Rp. 46.824.400,00 atau 93,71% dengan Sub Kegiatan:
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 49.966.000,00 terealisasi sebesar Rp. 46.824.400,00 atau 93,71%
- d) Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 277.091.670,00 terealisasi sebesar Rp. 186.702.895,00 atau 67,38% dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 3.346.310,00 terealisasi sebesar Rp. 2.129.000,00 atau 63,62%
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 21.910.240,00 terealisasi sebesar Rp. 19.893.200,00 atau 90,79%

- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penganggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 10.845.120,00 terealisasi sebesar Rp. 8.028.000,00 atau 74,02%
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 240.990.000,00 terealisasi sebesar Rp. 156.652.695,00 atau 65,00%
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 230.959.716,00 terealisasi sebesar Rp. 211.292.301,00 atau 91,48% dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 65.387.920,00 terealisasi sebesar Rp. 50.990.529,00 atau 77,98%.
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 20.705.740,00 terealisasi sebesar Rp. 20.682.000,00 atau 99,89%.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 144.866.056,00 terealisasi sebesar Rp. 139.619.772,00 atau 96,38%.
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 314.092.160,00 terealisasi sebesar Rp. 305.114.724,00 atau 97,14% dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 292.797.160,00 terealisasi sebesar Rp. 287.784.724,00 atau 98,29%
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 21.295.000,00 terealisasi sebesar Rp. 17.330.000,00 atau 81,38%

Analisa Program, Kegiatan dan sub kegiatan masih belum terealisasi maksimal yaitu (80%). Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 Indikator sasaran, yaitu:

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah

dengan sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu untuk kegiatan pelaksanaan pameran pembangunan dalam rangka hari jadi Kabupaten Tanah Laut tidak terealisasi dikarenakan target vaksinasi masih rendah di bulan Desember Kabupaten Tanah Laut termasuk Level 2 dari Pemerintah pusat sehingga ada pembatasan sosial atau acara untuk mengumpulkan masyarakat masih dibatasi dan hanya pameran bunga Anggrek terealisasi.

Penjelasan Realisasi Bidang kesekretariatan adalah sebagai berikut :

No	Urusan	Kegiatan	Target	Realisasi
1	Bidang Kepegawaian	1. Naik Pangkat Tmt 01 April 2021	1 Orang	1. Bakhram
		2. Naik berkala bulan Maret, April dan Juni 2021	8 Orang	1. Mosadeq Fahmi, S.Sos 2. Husairi, A.Md 3. Edy Siswoyo, A.Md 4. Suaibatul Ahmad 5. Uswatun Hasanah 6. Abdulah Haidi 7. Muhammad Jain 8. Bakhram
		3. Cuti	1 Dokumen	1 orang an. Nuriah bulan Nopember 2021
		1. SK Perpanjangan Kontrak PTT tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen sebanyak 39 orang
		2. SK Pensiun Janda (Oktober 2021)	1 Dokumen	An. Almarhum Bambang Slamet Riyadi
		3. Event yang diikuti	1 Pameran	Pameran Anggrek
2	Bidang Keuangan dan perencanaan	1. Calk	1 laporan	1 laporan
		2. Laporan Kinerja	1 Laporan	1 Laporan
		3. LPPD dan LKPJ	1 Laporan	1 Laporan
		4. Renja murni dan Perubahan	2 Laporan	2 Laporan
3	Bidang Umum dan Perlengkapan	1. KIB A,B,C,D,E,F 2. KIR 3. Laporan Barang pakai Habis dan Laporan Belanja Modal	1 Laporan	1 Laporan

	4. Sarana dan prasarana yang dipelihara dan dapat difungsikan	22 buah	20 Buah
--	---	---------	---------

B. Akuntabilitas Keuangan.

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp. 5.178.307.742,00 terealisasi sebesar Rp. 3.749.228.158,00 atau 72,40% yang terdiri dari :

- **Belanja Operasi**

Jumlah belanja Operasi ditetapkan sebesar Rp. 5.157.149.502,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.728.121.158,00 atau 72,29% berisi 2 (dua) belanja yaitu :

- Belanja pegawai PNS dianggarkan sebesar Rp. 2.327.832.388,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.763.624.127,00 atau 75,76%
- Belanja Barang dan Jasa dianggarkan Rp.2.829.317.114,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.964.497.031,00 atau 69,43%

- **Belanja Modal**

Berisi belanja Modal Peralatan dan Mesin ditetapkan sebesar Rp. 21.158,240,00 terealisasi sebesar Rp. 21.107.000,00 atau 99,76%.

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 5.178.307.742,00 Dari anggaran tersebut telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program yang terdiri atas 8 (delapan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan. Dari semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah terealisasi dengan baik, Realisasi menurut sasaran dan Program tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Program Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5	6
		SEKRETARIAT			
	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.755.360,-	27.921.200,-	85,24%
	Meningkatkannya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Program Penanggulangan bencana	1.954.838.128	1.227.146.511,-	62,77%
	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi organisasi	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.190.714.254,-	2.494.160.447,-	78,17%
	J U M L A H		5.178.307.742,-	3.749.228.158,-	72,40%

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 terdapat terdapat 4 (empat) Program yang terdiri atas 9 (Sembilan) kegiatan sedangkan Tahun 2021 terdapat 2 (Dua) Program yang terdiri atas 8 (Delapan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan. Berikut adalah table penyajian perbandingan sebagai berikut:

No	2020		2021	
	Program	Kegiatan	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
1	Program Pela-	Penyediaan Rapat-	Perencanaan,	Penyusunan

	yanan Admin-istrasi Perkantoran	rapat, konsultasi dan koordinasi	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa, bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan Sarana / Prasarana Perkantoran		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pameran Pembangunan
	Program pencegahan dan penanggulangan bencana	Pengendalian dan Penanganan darurat bencana	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pencegahan dan Pengendalian Risiko Bencana	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Pembinaan di wilayah pasca bencana	Administrasi umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Ba-		

				rang Cetakan dan Pengang-gandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penun-jang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeli-haraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pelayanan In-formasi Rawan Bencana Kabu-paten / Kota	Sosialisasi, Komunikasi, In-formasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsi-agaan Ter-hadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota
				Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota
				Penyediaan

				Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten / Kota
	Total Anggaran	3.428.832.639,60,-	Total Anggaran	5.178.307.742,-

Berikut adalah perbandingan Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan tahun 2021 dapat di lihat dibawah ini:

NO	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Langsung	Jumlah
1	Belanja Pegawai	1.467.694.867	Belanja Pegawai	2.327.832.388
2	Belanja Barang dan Jasa	2.259.342.944	Belanja Barang dan Jasa	2.829.317.114
3	Belanja Modal	478.502.800	Belanja Modal	21.158.240
	Total	3.736.037.811	Total	5.178.307.742,-

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LAKIP ini.

Secara umum rata-rata pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sesuai Rencana Stratejik Tahun 2018-2023 yang terdiri atas 3 (tiga) sasaran dalam tahun 2021 telah mencapai mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaan belum bisa dicapai secara maksimal. Bila dibanding dengan tahun 2020 dengan jumlah pencapaian sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 ada yang mengalami kenaikan, hal ini dengan adanya capaian nilai rata –rata semua unsur pelayanan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan unit pelayanan BPBD mengedarkan 150 (seratus lima puluh) kuesioner kepada masyarakat yang terdampak bencana yang didalamnya terdapat 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor IKM 83,82 kategori BAIK. Dengan nilai B (memuaskan) menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada umumnya sudah baik dan merasa sangat puas dengan pelayanan penanggulangan bencana bagi masyarakat yang terkena dampak langsung bencana baik karena faktor alam, bencana non alam dan bencana sosial.
2. Sasaran 2 juga mengalami kenaikan sehubungan dengan kejadian bencana yang di tangani oleh BPBD Tahun 2021 sebanyak 181 Kali kejadian, sedangkan Tahun 2020 yang ditangani sebanyak 120 kali sehingga kejadian lebih tinggi dari tahun 2021,

- a) sasaran ini dilihat dari Faktor alami seperti pengaruh *El-Nina*, menyebabkan musim hujan yang cukup panjang. Musim hujan 2021 kali ini diwarnai oleh latar belakang fenomena iklim global La Nina yang terjadi sejak awal Oktober 2020 dan diprediksi akan berlangsung hingga Mei 2021 dengan intensitas La Nina Moderat menjadi La Nina Lemah pada Maret 2022. Sementara itu, saat ini, analisis anomali suhu muka laut Samudera Pasifik bagian tengah menunjukkan kondisi lebih dingin minus 1.34 derajat Celcius dari normalnya. La Nina merupakan fenomena Suhu Muka Laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan Suhu Muka Laut (SML) ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. La Nina juga berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan sebagainya sehingga di tahun 2021 di Kabupaten Tanah Laut terjadi bencana banjir yang cukup tinggi dan terjadi pada 11 Kecamatan.
- b) Meningkatnya kesiapsiagaan dan peran serta masyarakat dalam pengurangan resiko bencana melalui Pelatihan, sosialisasi dan simulasi agar masyarakat atau kelompok peduli bencana(relawan) yang indeks resiko bencana tinggi di daerahnya bisa menggulangi bencana terlebih dahulu sebelum petugas kebencanaan/TRC datang dan Kesiapsiagaan juga untuk melakukan pemantauan dan mendeteksi informasi dari BMKG tentang Peringatan dini terhadap suatu bencana kepada masyarakat dan peningkatan aparatur di kabupaten maupun di kecamatan dalam penanggulangan bencana, pelaksanaan status darurat bencana maksimal 14 hari setelah bencana terjadi dengan memberikan dukungan logistik yang tersedia berupa sandang dan pangan yang akan didistribusikan kepada korban yang terdampak bencana serta terfasilitasinya masyarakat/kelompok masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi korban pasca bencana melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya.

- c) Sasaran 3 juga mengalami kenaikan di karenakan pelayanan di bidang administrasi perkantoran sebagai penunjang untuk meningkatkan penanggulangan bencana terhadap masyarakat melalui indikator penilaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM).

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dibuat dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sampai tahun 2021 masih banyak kendala-kendala yang harus dicarikan solusinya untuk peningkatan kinerja Permasalahan yang terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2021, adalah :

- a) Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum dapat dilaksanakan karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana tersebut.
- b) Pada saat musim kemarau Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sulit untuk dipadamkan apabila kebakaran hutan tersebut tidak bisa dijangkau oleh armada BPBD.
- c) Klasifikasi BPBD yang masih Type B mengakibatkan kesulitan untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi BPBD sebagai Komando, Koordinator dan Pelaksana lapangan pada saat tanggap darurat bencana karena stokeholder yang di komando dan di koordinasikan yaitu setingkat Eselon II.
- d) Kelengkapan dan alat-alat pengaman personil yang belum memadai dan belum berstandar nasional.

Solusi

- e) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas operasional lapangan seperti kendaraan damkar, rescue, dan peralatannya (baik untuk kebutuhan lapangan maupun untuk kelengkapan pengamanan personil).
- f) Untuk hutan dan lahan yang tidak bisa dilalui oleh armada maka dilakukan dengan water bombing itu pun harus menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

- g) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut selalu berkoordinasi dengan BMKG tentang prakiraan bencana di yang terjadi selama tahun 2021.
- h) Adanya dukungan lintas sektoral untuk kelancaran operasional lapangan

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2021, semoga memberikan informasi yang berarti bagi yang memerlukan serta menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Pelaihari, Februari 2022

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tanah Laut



Ir. SAHRUDIN
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19661210 199403 1 001